

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengacu dari terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Urgensi penyelenggaraan pemilu yang menjadi suatu komponen penting implementasi negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu juga merupakan salah satu pilar dalam proses pelaksanaan akumulasi kehendak dari masyarakat. Pemilu juga merupakan gambaran umum pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu menjadi tahap paling awal dari rangkaian tatanan negara yang demokratis. Menurut (Sardini, 2011) Pemilu adalah salah satu pilar utama dari suatu proses pengumpulan tujuan masyarakat sekaligus proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi, dikarenakan pemilu merupakan suatu mekanisme terkait pendelegasian dari wujud kedaulatan rakyat terhadap penyelenggara negara. Pemilu juga merupakan suatu prosedur dalam pemindahan pertentangan kepentingan dan aspirasi masyarakat ke dalam lembaga penyelenggaraan negara. Selain itu, Pemilu juga sebagai suatu mekanisme untuk upaya perubahan-perubahan politik secara periodik, baik melalui proses sirkulasi dan elit politik maupun perubahan yang bertujuan pada pola dan arah pembuatan kebijakan publik (Fitriyah, 2013).

Penyelenggaraan Pesta demokrasi melalui Pemilu yang diselenggarakan atas dasar adanya manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Penyelenggaraan Pemilu juga tidak pernah terlepas dari peran warga negara, dikarenakan perannya dalam menjalankan hak konsitusional warga negara baik

melalui hak memilih maupun dipilih. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemilu adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Penyelenggaraan Pilkada merupakan suatu ajang dari proses suksesi tongkat kepemimpinan di suatu daerah yang melibatkan peran secara langsung oleh rakyat dan publik secara berkedaulatan (Hasrul, 2016). Pilkada juga merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk menentukan dan memilih figur kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Selain sebagai sarana kedaulatan rakyat, Pilkada juga berperan sebagai pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Hal ini akan berdampak pada sarana memperkuat integritas politik nasional dan juga akan menciptakan suatu pemerintahan yang efektif dari terselenggaranya Pilkada tersebut.

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satu problematika tersebut yaitu pencalonan pasangan yang akan mendaftarkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya tiga daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal saja. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Yunus pada tahun 2018 disampaikan mengenai munculnya fenomena calon tunggal juga menjadikan adanya landasan hukum dari adanya problematika tersebut

yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi NO. 100 PUU XIII 2015 yang menentukan mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak, yaitu dengan memberikan peluang bagi satu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur/ wakil gubernur, walikota/ wakil walikota dan bupati/ wakil bupati untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak melalui mekanisme memilih setuju atau tidak setuju (Yunus, 2018).

Terdapatnya landasan hukum yang telah diatur dalam putusan MK tersebut juga berpengaruh pada penyelenggaraan pilkada serentak dengan calon tunggal pada tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020, dari data yang didapatkan di dalam informasi digital yang terdapat pada *website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Dari data jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut, terdapat 25 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal atau tanpa lawan dalam kontestasi pilkada tersebut. Fenomena kemunculan dari calon tunggal dalam pelaksanaan pada tahun 2020 ini, juga bisa dikatakan mengalami kenaikan secara signifikan. Munculnya kontestasi Pilkada calon tunggal terjadi pada tahun 2015 yaitu terdapat sejumlah 3 daerah yang melaksanakan pilkada secara calon tunggal. Kemudian berlanjut pada tahun 2017, terdapat 9 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal terjadi kenaikan kembali pada pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2018, dengan terdapatnya 16 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal.

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, total terdapat 6 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Hal ini terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal. Dua daerah tersebut dalam hasil yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 memiliki keunikan masing-masing. Mengenai penyelenggaraan Pilkada di kedua tempat tersebut juga terdapat unsur kesamaan yang terjadi yaitu dari pasangan calon tunggal dari kedua daerah tersebut memiliki paai pengusung utama yang sama. Kemudian juga adanya faktor kekuatan petahana yang juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai pengaruhnya dalam penyelenggaraan Pilkada di wilayah tersebut. Faktor kekuatan petahana tersebut seperti yang terjadi pada pasangan calon walikota dan wakil walikota yang saat ini telah resmi terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang yaitu Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti, atau yang akrab disebut dengan pasangan (Hendi-Ita) yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku partai pengusung utama dalam penyelenggaraan pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Boyolali. Dominasi dari partai PDI-P juga terlihat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tercatat enam daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal dari calon kepala daerah semuanya merupakan kader dari partai dengan logo kepala banteng tersebut.

Penyelenggaran Pilkada yang terjadi di Kota Semarang telah terlaksana dengan menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 yaitu, H. Hendar Prihadi Alias Hendi, S.E., MM

dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos. Dengan gabungan partai politik pengusung yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indoensia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut informasi resmi yang terdapat pada *website* KPU Kota Semarang, pasangan tersebut memperoleh suara sah sebanyak 716.693 suara atau 91,56 % dari total suara sah. Sementara untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali juga telah selesai dilaksanakan dengan pasangan terpilih yaitu M. Said Hidayat dan Wahyu Irawan dengan memperoleh suara sah sebanyak 666.956 suara atau sebesar 95.60 %. Terpilihnya Said sebagai Bupati Boyolali juga mendapat suatu atensi dari masyarakat dikarenakan posisinya sebelumnya menjadi Wakil Bupati Boyolali. Pasangan Said–Wahyu dalam pecalonannya mendapatkan dukungan dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Melihat dari hasil rekapitulasi suara yang terdapat pada kedua daerah tersebut menggambarkan kekuatan dukungan yang sangat tinggi terhadap pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yang terjadi pada kedua wilayah tersebut. Terkait dari hasil yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada di kedua tersebut, menjadikan suatu penelitian ini menarik untuk digali informasinya dalam proses terjadinya calon tunggal di kedua daerah tersebut.

Melihat dari pola munculnya fenomena calon tunggal yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada secara umum di tahun 2020, dan secara khusus yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Terdapat beberapa faktor secara

umum mengenai suatu penyebab lahirnya pilkada dengan calon tunggal. Hal ini disampaikan melalui penelitian Iza Rumesten pada tahun 2016 yaitu, pertama, mengenai faktor figur ketokohan yang sangat kuat di suatu daerah, hingga membuat tokoh tersebut yang hendak maju dalam kontestasi pilkada tidak ada yang menandinginya dikarenakan kapabilitas tokoh tersebut dalam tingkatan ekonomi, jaringan politik dan juga popularitasnya di kalangan masyarakat yang tinggi. Kemudian pengaruh dari kekuatan partai politik di daerah tersebut yang mendominasi juga dikarenakan memiliki perolehan suara yang tinggi. Hal ini terlihat dari hasil Pemilihan Legislatif yang terjadi di tahun 2019 maupun hasil pilkada di periode sebelumnya. Faktor tersebut akan berpengaruh pada ketidakmampuan partai politik yang lain dalam menghasilkan kaderisasi suatu tokoh kepemimpinan yang cukup kuat untuk menandingi pilkada di wilayah tersebut (Rumesten, 2016).

Hegemoni politik fenomena calon tunggal yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat argumen mengenai munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada terkait dengan proses kapitalisasi. Hal ini dikaitkan dengan mahalnya mahar politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pilkada dengan calon tunggal dalam pilkada (Lestari *et al.*, 2019). Dikarenakan faktor tersebut juga menyebabkan adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh para elite politik yang tidak hanya mengejar kekuasaan semata, dalam hal ini juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari pesta demokrasi lokal tersebut. Kemudian dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, dapat dikatakan terjadi sirkulasi penguasa dalam lingkup perputaran kekuasaan lingkaran oligarki

tersebut. Melalui cara ini, oligarki dapat mempertahankan dominasi politik yang dapat melengserkan mereka dalam kekuasaan politik yang telah dibangun pada suatu daerah tersebut. Argumentasi mengenai keterkaitan oligarki politik dengan sistem demokrasi juga diungkapkan dalam buku *How Democracy Die ?* karya Steven Levitsky tahun 2020. Disampaikan dalam isi buku tersebut terkait sebuah paradoks tragis jalan menuju kerusakan melalui pemilu, hal ini terlihat dikarenakan adanya para pembunuh demokrasi dengan menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri secara pelan dan halus, bahkan legal untuk membunuhnya (Steven Levitsky, 2020). Menurut pertanyaan tersebut dapat disimpulkan kekejaman sistem oligarki yang terjadi dan berdampak sangat besar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Problematika terkait adanya fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada dalam penelitian terdahulu juga diteliti oleh Lili Romli pada tahun 2018, penelitian tersebut berjudul *Pilkada langsung, calon tunggal dan masa depan demokrasi lokal*. Penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli tersebut disampaikan bahwa seharusnya dalam hal ini partai politik lainnya mempunyai kader yang dapat diusung dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Namun, situasi yang terjadi berkebalikan, dengan tidak adanya kaderisasi partai politik yang menjadi penantang dalam persaingan penyelenggaraan pilkada tersebut. Dampak yang terjadi secara otomatis, dengan adanya kemudahan calon tunggal tersebut dalam memenangkan pada penyelenggaraan pilkada tersebut. Faktor penyebab lainnya juga yang menyebabkan suatu daerah terdapat pasangan dengan calon tunggal yaitu faktor rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat, yang dalam hal ini berpengaruh

pada wadah aspirasi untuk memilih kotak kosong. Terkait terdapatnya beberapa faktor yang menjadi penyebab lahirnya pilkada dengan calon tunggal juga memunculkan situasi yang berdampak pada mematikan demokrasi melalui Pemilu lokal yang tidak mengenal adanya persaingan yang sengit dan kompetitif dalam kontestasi pencalonan penyelenggaraan pilkada tersebut (Romli, 2018).

Partai politik sejatinya dalam penyelenggaraan Pilkada, memiliki dominasi kuat keterkaitannya dengan perhelatan pesta demokrasi sehingga terkadang menampilkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat. Hal ini memang dapat diakui dari adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada serentak terjadi merupakan salah satu bentuk dari suatu demokrasi yang empirik. Kondisi munculnya fenomena calon tunggal merupakan suatu keadaan yang secara normatif tidak dapat terbayangkan dan tidak terduga sebelumnya, bahkan minus rekayasa. Problematika yang terjadi ini menggambarkan bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. Penyelenggaraan pilkada secara serentak yang dilaksanakan dengan calon tunggal, juga pernah terjadi pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Makassar. Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Kota Makassar dengan pasangan calon tunggal memiliki keunikan, dikarenakan dari hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Makassar, penyelenggaraan pilkada tersebut dimenangkan kotak kosong. Proses penelitian tersebut yang memfokuskan pada penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal di Kota Makassar tersebut menggambarkan bahwa fenomena kotak kosong seolah membuka lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya pilkada

harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat bukan hanya pilihan partai politik

Kondisi yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali sebenarnya jauh berkebalikan dengan penyelenggaraan pilkada yang telah terjadi di Kota Makassar pada tahun 2018. Kondisi ini berbeda dikarenakan yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali dari hasil rekapitulasi penyelenggaraan pilkada yang telah berlangsung memenangkan pasangan calon tunggal dengan hasil rekapitulasi suara yang sangat tinggi. Mengenai paparan penjelasan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan besar yang nantinya akan diungkap dalam penelitian ini yaitu mengenai penyebab terjadinya penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal di kedua daerah tersebut hingga menghasilkan rekapitulasi suara yang sangat tinggi. Selain itu juga, mengenai keterkaitan pasangan calon tunggal tersebut apakah murni sejatinya pilihan rakyat atau hanya pilihan partai politik saja dalam kontestasi penyelenggaraan pilkada pada kedua daerah tersebut.

Penelitian mengenai pilkada dengan calon tunggal sebelumnya juga telah dilakukan penelitian oleh Nur Hidayat Sardini dan Fitriyah, namun dalam hal ini penelitian berfokus terhadap gerakan perlawanan masyarakat mengenai pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pati pada tahun 2017 melalui ajakan untuk gerakan memilih kotak kosong. Penelitian tersebut berjudul *The Phenomena of “ An EmptyBox “ and the Resistence of Pati People to the Oligarchy in the Local Election Pati*. Pada penelitian berisi tentang kemunculan fenomena kotak kosong dan juga perlawanan dari beberapa kelompok masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah yang dinilai cenderung mendukung sistem

oligarki yang terjadi di daerah tersebut. Penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Pati pada tahun 2017 itu menimbulkan tanggapan yang beragam oleh masyarakat, ada yang berpandangan bahwa hal tersebut sebagai langkah penyeimbang politik, namun juga ada dugaan dalam merencanakan sistem oligarki politik yang semakin kuat di daerah tersebut. Penelitian tersebut sangat menarik dikarenakan juga menyampaikan terkait tanggapan masyarakat mengapa tidak setuju terdapatnya pasangan calon tunggal dan juga beberapa masyarakat yang mendeklarasikan untuk memilih kotak kosong, dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja bupati petahana yang juga maju kembali menjadi pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada waktu itu. Kemudian juga faktor keterlibatannya dalam perijinan pembangunan pabrik semen yang terdapat di wilayah setempat, yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan gerakan perlawanan melalui kotak kosong tersebut (Nur Hidayat Sardini, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang terjadi terkait munculnya hegemoni politik fenomena lahirnya calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali tersebut, menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya keunikan yang terjadi dalam penyebab dan faktor-faktor lahirnya pasangan calon tunggal di kedua daerah tersebut, kemudian juga mengenai proses dan hasil dari penyelenggaraan pilkada di kedua wilayah tersebut. Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran fakta di lapangan mengenai perbandingan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali tahun 2020 ditinjau dari perspektif hegemoni politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas rumusan masalah penelitian yang didapat adalah, sebagai berikut:

1. Mengapa kemunculan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terjadi ditinjau dari perspektif hegemoni politik ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunculan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?
3. Bagaimana perbandingan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena muunculnya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditinjau dari perpektif hegemoni politik.
2. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai perbandingan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur studi ilmu politik tentang penyelenggaraan pilkada, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada calon tunggal yang terjadi di Indonesia ke depannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi sumber informasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat terhadap implikasi calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada yang. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji maupun meneliti permasalahan yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pilkada Calon Tunggal

Pilkada merupakan suatu upaya implementasi proses demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang adil, jujur dan damai. Salah satu prinsip dalam proses demokrasi yaitu adanya sikap pengakuan

terhadap perbedaan dengan penyelesaian secara damai tanpa pertikaian. Indonesia dengan bentuk negara kesatuan dan ideologi Pancasila, diharapkan mampu mengatasi berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa, salah satunya pada penyelenggaraan pilkada calon tunggal. (Ishak, 2020) Calon tunggal disinyalir lahir karena berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Faktor-faktor tersebut diharapkan mampu memudahkan dari penelitian pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali dapat mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu mengungkap mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pilkada calon tunggal, hal ini menjadi acuan dalam mengkaji penelitian ini, adapun faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut di antaranya,

1. Regulasi Ambang Batas

Faktor regulasi ambang batas merupakan faktor legal formal dalam salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Terdapatnya aturan Undang-Undang Pilkada Pasal 40 No.10 Tahun 2016, mengenai terselenggaranya syarat pengajuan pencalonan kepala daerah yang hendak maju melalui jalur partai politik harus diusung oleh partai politik di DPRD dengan memiliki kursi sejumlah 20% (dua puluh) dari jumlah kursi DPRD atau suara sah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.. Dampak dari adanya aturan tersebut memunculkan tanggapan terkait faktor yang berpengaruh terjadinya dari fenomena Pilkada calon tunggal. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari dominasi politik yang terjadi dari salah satu partai politik tertentu mampu

menciptakan keterbatasan ruang bagi partai politik lainnya dalam maju pada kontestasi Pemilu lokal (Ekowati, 2019).

2. Petahana

Faktor petahana dalam terjadinya penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal menjadi salah satu pengaruh besar, dikarenakan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, terdapat sejumlah 23 dari 25 calon tunggal pada ajang kontestasi Pilkada menjadi salah satu bukti konkret banyaknya calon tunggal adalah *incumbent*/petahana. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh petahana dengan kekuatan sumber daya dan kekuasaannya menjadi tolak ukur bagi lawan politiknya apakah sanggup bisa mengalahkan dari petahana tersebut. Pengaruh kuat faktor petahana dalam terjadinya calon tunggal pada Pilkada, dikarenakan aspek kinerja dan citra yang bagus dihadapan masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan dari lawan politik berpikir ulang untuk tidak mengambil risiko, dikarenakan juga pengaruh pada biaya politik dan tenaga yang begitu besar untuk mengalahkan dari petahana pada kontestasi Pilkada. (Rahman et al., 2022) Faktor tersebut telah dibuktikan dari penelitian pada Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Grobogan tahun 2020 (Riky Fajar Sujatmiko1, 2022). Yang menjelaskan bahwa kekuatan personal petahana dari Bupati Sri Sumarni yang maju kembali pada kontestasi pilkada waktu itu, memiliki kinerja yang baik dengan diimbangi juga dukungan dan sumber daya yang cukup. Hal tersebut juga dilihat dari beragam prestasi dan kepuasan pada masyarakat atas kinerja yang dilakukan.

3. Kegagalan Pendidikan Politik

Calon tunggal ini dapat juga lahir dikarenakan dari kaderisasi partai poliik yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi dari aspek mesin partai yang tidak berfungsi dengan baik sehingga memberikan kaderisasi yang tidak berfungsi dengan maksimal. Peran dari partai politik itu mencetak kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing maupun tingkat level nasional. (Habibi, 2015) Partai politik merupakan kendaraan bagi masyarakat untuk bisa maju pada kontestasi politik dan juga mampu melahirkan kader dan calon pemimpin di masa depan. Untuk melahirkan pemimpin bagi masyarakat tidaklah mudah, dan tidak juga bisa lahir secara instan. Ada beberapa tahapan secara ketat yang harus dilaksanakan unuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukannya peran partai politik dalam memeberikan pendidikan politik bagi kader partai agar memiliki kemampuan kepemimpinannya.

Penidikan politik selain diberikan kepada kader-kader partai politik tersebut, juga harus diberikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan masyarakat agar masyarakat bisa memahami pendidikan politik guna menilai calon pemimpin yang pantas untuk dipilih melihat dari kemampuan yang dimilikinya. Dikarenakan bila masyarakat tidak memahami dari pendidikan politik, hal ini bisa menjadi peluang bagi calon pemimpin yang memanfaatkan dari segi pragmatis. Hal ini jelas akan berdampak pada keuntungan dari kepentingan tertentu saja. Terkait realita yang terjadi di lapangan, tak jarang partai politik untuk meminimalisir *cost and benefit* melakukan cara secara instan dengan memili kembali petahana, yang dalam hal ini tiak memiliki biaya dan usaha politik yang cukup besar dan resiko kekalahan yang juga kecil dikarenakan faktor populer di kalangan masyarakat.

4. Biaya Politik

Biaya politik atau yang biasa juga disebut sebagai mahar politik merupakan salah satu faktor terjadinya calon tunggal dalam pilkada. Padahal dalam hal ini, biaya politik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan transaksional yang melanggar dari regulasi hukum yang ada. Biaya politik dilaksanakan dengan cara memberikan sejumlah dana untuk suatu jabatan politik yang akan diperebutkan dalam pemilihan sebagai bakal calon kepala daerah dari partai politik tersebut sebagai kendaraan politiknya. (Ekowati, 2019) Uang dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi dalam hal ini akan mendekati dari waktu penyelenggaraan pemilihan legislatif maupun eksekutif. Faktor tersebut juga menjadikan salah satu penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Grobogan yang menjelaskan biaya politik yang tinggi menyebabkan salah satu terjadinya fenomena tersebut. Biaya politik yang tinggi dikeluarkan oleh pasangan calon merupakan suatu bentuk bagaimana pentingnya peran calon dalam menggaet suara. Akibatnya dari praktik yang terjadi atas sebab berikut, terdapatnya potensi untuk melakukan tindak pidana semakin tinggi selama menjabat yang memiliki keterkaitannya dengan pengaruh petahana.

5. Komunikasi Politik

Faktor komunikasi politik sangat berpengaruh terhadap munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Komunikasi politik yang bersifat intensif dan efektif, dilakukan oleh perwakilan partai politik maupun dari calon kepala daerah itu bertujuan untuk menyatukan satu pikiran dalam berkolaborasi pada kontestasi penyelenggaraan Pilkada. Apabila dalam komunikasi politik tersebut, terdapat nota

kesepakatan dari suatu kelompok maupun individu kelompok atau individu lainnya akan meningkatkan juga kepada peluang yang lebih besar untuk memenangkan suatu kontestasi Pilkada. Hal ini biasanya terjadi selain terdapatnya suatu visi misi yang selaras, juga pengaruh terhadap pada distribusi baik anggaran maupun jabatan kepada partai politik tersebut. Langkah komunikasi politik ini biasanya dilakukan oleh para petahana maupun partai politik pengusung dari calon kepala daerah untuk membentuk suatu koalisi. Langkah komunikasi politik yang berusaha untuk merangkul semua partai politik, dengan adanya suatu kesepakatan bersama untuk memunculkan satu pasangan calon tunggal, hal inilah yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya pilkada dengan calon tunggal. Pengaruh komunikasi politik tersebut dalam terjadinya pilkada calon tunggal juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Landak pada tahun 2017. Langkah komunikasi politik tersebut dengan membangun komunikasi politik antar partai politik di daerah setempat, sehingga terbentuknya koalisi dari seluruh partai politik dengan tidak adanya lawan politik pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Landak tahun 2017. (Fahriansyah Ori, 2020)

6. Karakter Politik

Karakter politik masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Pilkada Calon Tunggal juga. Seperti yang diungkapkan pada penelitian Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pati, terdapat dua model pendekatan yang dalam hal ini menjelaskan etnografi politik masyarakat. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis berasumsi bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh beberapa macam karakteristik. Hal tersebut meliputi dari aspek kelas sosial,

agama, kelompok etnik dan kedaerahan. Adapun pendekatan psikologis lebih menekankan pada faktor-faktor kesamaan pada partai politik maupun dari kandidat. Salah satu variabel dari pendekatan psikologis yaitu dari identifikasi melalui perasaan keterlibatan atau rasa memiliki yang terdapat dalam diri seseorang maupun individu terhadap partai politik.

7. Figur Politik

Figur merupakan seorang tokoh maupun pemimpin yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan, pemerintah, lembaga awasta, partai politik maupun dalam negara. Seorang pemimpin yang terpilih oleh masyarakat terlihat dari beberapa kriteria, seperti dari kinerja yang baik, penghargaan maupun prestasi dan tanggung jawab. Seseorang yang menjadi publik figur akan menjadi pusat perhatian dari banyak orang, sehingga peran figur sangat penting sebagai bentuk representasi kepada masyarakat. (Hermanto et al., 2020) Peran figur politik tersebut dalam terjadinya pilkada calon tunggal juga telah dibuktikan oleh penelitian, terkait faktor terjadinya Pilkada calon tunggal Kabupaten Landak. Penelitian tersebut menjelaskan peran figur politik dari calon kepala daerah yang memiliki sifat merakyat dan memiliki popularitas di kalangan masyarakat menjadikan figur dari calon kepala daerah sangat berpengaruh dalam terjadinya pilkada calon tunggal.

1.5.2 Teori Hegemoni Politik

Penelitian ini mengacu pada penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terkait tantangan yang dihadapi dalam pesta demokrasi tersebut. Pilkada pada tahun 2020 terdapat fenomena munculnya calon tunggal yang semakin tinggi

untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Kedua daerah tersebut memiliki keunikan masing-masing dalam penyelenggaraan Pilkada dengan pasangan calon tunggal. Keunikan tersebut yang menjadikan juga untuk penelitian ini diangkat untuk dijadikan proses penelitian skripsi ini.

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali memiliki keunikan realita yang terjadi di lapangan. Salah satunya yaitu kedua wilayah tersebut memiliki kesamaan dengan partai pengusung utama yang sama yaitu Pdi Perjuangan sebagai pendukung dan kader dari kedua Kepala Daerah tersebut. Kemudian melihat dari hasil dari rekapitulasi suara yang sangat dominan untuk kemenangan kandidat calon tunggal, memperlihatkan juga dari dominasi yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada di kedua daerah tersebut.

Melalui penjelasan yang terdapat di atas, dalam kerangka teori penelitian skripsi ini, teori mengenai konsep hegemoni maupun dominasi kekuasaan, berupaya memperkuat untuk membuktikan terkait fakta yang terjadi di lapangan. Konsep hegemoni diperkenalkan dan dikembangkan oleh seorang pemikir dari Italia, yaitu Antonio Gramsci. Hegemoni sering diartikan sebagai penggabungan antara paksaan dan persetujuan. Antonio Gramsci adalah seorang intelektual besar di kalangan kaum kiri, yang disebut sebagai pemikir terbesar setelah Karl Marx. Pemikiran-pemikiran Gramsci tetang dalam banyak artikel yang dimuat di media massa, dan dalam buku-buku karyanya seperti; *Prison Notebooks*, *The Modern Prince*, *Selection from Cultural Writing* dan sebagainya Dari seluruh karya dan

tulisannya, hegemoni dinilai sebagai ide sentral dan orisinal yang dikembangkan Gramsci. Teori Hegemoni dipandang telah membawa perubahan besar dan menimbulkan perdebatan pemikiran atas teori-teori perubahan sosial, terutama bagi yang mengehndaki perubahan radikal dan revolusioner.

Sebelum Gramsci, Lenin telah meletakkan dasar-dasar konsep hegemoni. Bagi Lenin, hegemoni adalah strategi revolusi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Grasci memperluas pengertian hegemoni Lenin, sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya., baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki. Gramsci menyatakan bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas iu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi kerakyatan. Teori hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran penganut Marxisme dan Non-Marxixme.

Titik awal konsep hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya degan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui

penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni(Siswati, 2018). Menurut Gramsci, kekuasaan dari seorang pemimpin dapat bertahan apabila memiliki dua perangkat kerja, Pertama adalah perangkat kerja yang sifatnya memaksa, kemudian yang kedua adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat semua golongan untuk taat terhadap mereka yang berkuasa melalui kehidupan agama, pendidikan, kesenian, keluarga, dan seterusnya. Keduanya memiliki keterkaitan dengan fungsi hegemoni, dalam dominasi langsung yang dilaksanakan oleh Negara dan pemerintahan yuridis dan disisi lain kelompok yang dominan menangani keseluruhan masyarakat.

Terkait hegemoni tidak hanya sekedar kekuasaan sosial saja, namun juga terkait bagaimana cara yang dipakai untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Adapun teori hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci adalah sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang realita yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan, (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, serta juga terkait prinsip-prinsip religius dan politik. Sebagaimana mengenai konsep hegemoni. Gramsci memiliki konsep yang sepadan yaitu mengenai kelompok dominan dan kelompok *subaltern*, kedua konsep tersebut pada dasarnya sama-sama menolak adanya kebenaran mutlak dan sama-sama setuju terhadap kaum-kaum yang didominasi atau kaum yang marginal. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung menolak reduksi manusia, termasuk narasi kecil, dan menolak konsep-konsep yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak. Sehubungan dengan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh Gramsci,

ia menjelaskan hegemoni sebagai proses berkelanjutan dalam pembentukan dan penggulingan keseimbangan yang tidak stabil antara kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa dan kepentingan kelompok dikuasai, keseimbangan dimana kepentingan kelompok yang berkuasa hadir, namun hanya pada batas-batas tertentu. Dikarenakan hegemoni harus terus-menerus diciptakan dan dimenangkan sangat terbuka kemungkinan untuk menentangnya, yaitu terciptanya golongan yang menentang kekuasaan dari kelompok dan kelas yang dikuasai.

Mengenai penjelasan yang terdapat di bagian atas, Gramsci mempertegas kembali mengenai keterkaitan hegemoni dan negara, dengan menyatakan bahwa negara dibedakan menjadi dua wilayah yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai pusat dari kekuasaan koersif dalam suatu masyarakat dan masyarakat politik dapat didefinisikan sebagai lokasi dari kepemimpinan hegemoni. Negara juga merupakan suatu elemen penting dalam menciptakan ataupun melawan hegemoni. Peran dari negara sangat besar dalam menentukan kebijakan untuk mempengaruhi kehendak masyarakat, oleh karena itu negara terkadang dilambangkan sebagai kekuasaan atas kehndak rakyat. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam dunia ini sehingga hegemoni bisa tercipta, karena di sana terjadi suatu proses persetujuan dan proses kekerasan. Proses kekerasan identik dengan dunia politik, sementara pross persetujuan identik dengan dunia dari masyarakat sipil. Hegemoni akan terjadi, jika dalam hal ini peran dari masyarakat sipil menyetujui, kemudian melaksanakan tanpa sadar, serta mentaati apa saja yang disebarkan oleh dari kelompok masyarakat politik. Masyarakat politik yang dimaksudkan ini ditujukan kepada, instansi publik yang memiliki peranan

dalam memegang kekuasaan untuk melaksanakan suatu perintah secara yuridis. Aktifitas teoritis dan praktis dalam suatu negara, sangat kompleks dengan adanya kelas penguasa yang dalam hal ini, tidak hanya memiliki kepentingan untuk mempertahankan dominasinya, melainkan juga memiliki kepentingan untuk berusaha memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya.

Penjelasan yang disampaikan Antonio Gramsci terkait Teori Hegemoni politik yang terdapat dalam suatu negara tersebut, bila melihat dari problematika yang terjadi dalam penelitian penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Terdapatnya realita hegemoni politik yang terjadi di lapangan, hal tersebut selaras dengan pendapat yang dipertegas oleh Gramsci yang menyampaikan, peran dari masyarakat politik yang memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan yang dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap mempertahankan kekuasaan oleh kelas penguasa. Seperti yang kita ketahui, terdapatnya kebijakan mengenai ambang batas yang terdapat di Indonesia, merupakan suatu kebijakan oleh negara yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik ini menjadi salah satu indikator guna pengaruh dari ambang batas tersebut dengan keterkaitannya pada terjadinya fenomena tersebut. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa konsep hegemoni politik terjadi secara tersistematis dari cara-cara yang telah dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi partai politik yang berkuasa di daerah yang memiliki ambang batas lebih dari yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan menciptakan

suatu dominasi kekuasaan di suatu wilayah tertentu dikarenakan terdapatnya suatu kebijakan ambang batas tersebut. Pada penelitian skripsi ini dalam hasil yang didapatkan, berupaya menjelaskan tentang keterkaitan terjadinya pilkada calon tunggal dengan pengaruh hegemoni politik di kedua daerah tersebut. Aspek-aspek yang telah disampaikan dalam pernyataan teori hegemoni politik ini akan memudahkan dari peneliti mengidentifikasi realita fenomena pilkada calon tunggal dan sebab adanya hegemoni politik tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Proposal skripsi dengan judul “Hegemoni Politik Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 : Studi Kasus di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.” ini mengangkat dari adanya fenomena calon tunggal yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, merupakan dua wilayah dalam penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang memiliki keunikan dan hal yang menarik untuk diteliti. Adanya dominasi politik terlihat dari hasil rekapitulasi suara penyelenggaraan Pilkada di kedua wilayah tersebut, dalam hal ini dari fenomena yang terjadi terdapat keterkaitan juga dengan konsep hegemoni politik yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Penjelasan tentang hegemoni politik dalam keterkaitannya dengan penelitian fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali dengan terdapatnya realita hegemoni politik yang terjadi di lapangan. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dipertegas oleh

Gramsci yang menyampaikan, peran dari masyarakat politik yang memiliki peran, dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah berpengaruh terhadap cara mempertahankan kekuasaan oleh kelas penguasa. Seperti yang kita ketahui, terdapatnya kebijakan mengenai *presidential threshold* yang terdapat di Indonesia, merupakan suatu kebijakan oleh negara yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada, dalam hal ini secara khusus mengenai pencalonan kepala daerah untuk mengikuti Pilkada.

Fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada juga dapat disebabkan karena berupa segi ketokohan yang sangat kuat dalam suatu daerah, kemudian juga dikarenakan adanya partai politik yang mendominasi dalam wilayah tersebut. Faktor lain juga disebabkan karena mahalnya biaya dalam proses pencalonan atau yang sering disebut dengan ‘mahar politik’ yang diminta oleh partai pengusung. Faktor dalam kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, hingga partai politik tidak mempunyai kader yang kuat untuk diusung dalam Pilkada. Hegemoni politik merupakan kerangka teori yang bertujuan untuk mendukung dalam proses penelitian skripsi ini. Selain dari pada itu, penelitian skripsi ini juga bertujuan untuk studi perbandingan fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Adanya cakupan-cakupan dalam operasionalisasi konsep tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam Penelitian Skripsi ini.

1.7 Metode Penelitian

Proses pelaksanaan metode penelitian terdapat penerapan langkah-langkah maupun metode yang merupakan suatu rangkaian kegiatan, antara lain:

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Cresswell,2009) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat spesifik dengan mengamati subjek yang terdapat dalam lingkungan tersebut, baik saat berinteraksi dengan informan maupun menafsirkan pendapat informan tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. proposal penelitian melalui pendekatan secara deskriptif –analitik, dengan bertujuan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang fenomena utama (*central phenomenon*). Pelaksanaan penelitian ini juga bertujuan guna mencari data – data melalui teknik triangulasi (gabungan), analisis dan dalam hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pendalaman makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu kawasan atau lokasi penelitian itu dilaksanakan dengan melakukan proses pengambilan data yang terdapat di tempat

tersebut. Dalam melaksanakan penelitian terkait implikasi calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan kedua wilayah tersebut pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 memiliki unsur kesamaan yang menjadi suatu keunikan tersendiri dalam penelitian ini agar dapat diangkat mengenai fakta yang terjadi di lapangan nantinya.

1.7.3 Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan para perwakilan partai politik, lembaga swadya masyarakat dan Instansi terkait yang berkaitan secara langsung dalam penelitian pilkada calon tunggal yang terdapat di kedua wilayah tersebut. Informan memahami betul mengenai proses penyebab terjadinya dan penyelenggaraan pilkada calon tunggal pada tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Informan yang terdapat pada penelitian skripsi ini sejumlah 9 orang yang meliputi perwakilan partai politik, lembaga swadya masyarakat, KPU yang terdapat di kedua daerah tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan perwakilan pemilih dari masyarakat daerah tersebut. Profil informan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Tabel Profil Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jabatan
1	Hery Abriyanto	Laki-Laki	53	Anggota Komisioner KPU Kota Semarang
2	Agus Rosaildi	Laki-Laki	55	Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kabupaten Boyalali
3	Nur Arifin	Laki-Laki	49	Ketua PKS Kabupaten Boyolali

4	Andi Sarjono	Laki-Laki	47	Ketua Lsm KIPP Kabupaten Boyolali
5	Maya Yudayanti	Perempuan	43	Anggota Komisioner KPU Kabupaten Boyolali
6	Eko Maryoto	Laki-Laki	59	Perwakilan Pemilih Pilkada Kabupaten Boyolali
7	Ali Umar Dhani	Laki-Laki	38	Ketua Bidang Pilkada dan Pemilu Pks Kota Semarang
8	Novriadi	Laki-Laki	52	Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Kota Semarang

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan

Berikut merupakan profil informan dalam penelitian skripsi ini. Informan menyampaikan keterkaitannya dari permasalahan yang terjadi mengenai fenomena terjadinya pilkada calon tunggal pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Selain menyampaikan proses penyebab secara umum terjadinya fenomena pilkada calon tunggal melihat dari perspektif hegemoni politik, informan juga menyampaikan mengenai faktor-faktor secara khusus dari proses terjadinya pilkada calon tunggal pada kedua daerah tersebut.

1.7.4 Teknik Pengumpulan data Analisa dan Interpretasi Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Dalam proses penelitian ini sumber data dikumpulkan dari beberapa teknik yang meliputi wawancara, studi literatur, observasi serta dokumentasi dengan penjelasan seperti berikut:

1.7.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam kepada informan tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

penelitian. Proses pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah terstruktur sesuai dengan isu atau tema yang diangkat. Dalam proses wawancara, peneliti juga dapat perekaman sebagai bentuk bukti asli dan dijadikan nilai tambah saat mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan mengupas satu per satu secara mendalam agar terkumpul data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam proses wawancara adalah semua jawaban yang disampaikan oleh narasumber yang kemudian dicatat oleh peneliti. Narasumber maupun informan dalam proses wawancara guna penelitian ini yaitu pihak KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Boyolali, Perwakilan partai politik yang mendukung dan tidak memilih dalam penyelenggaraan di kedua daerah tersebut dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut.

1.7.4.2 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder atau data penunjang yang digunakan untuk melengkapi data yang sudah didapatkan sebelumnya. Studi literatur didapatkan dengan membaca buku jurnal penelitian terdahulu serta literatur terkait dengan permasalahan dalam topik penelitian tersebut. Studi literatur merupakan wujud untuk menyelaraskan antara teori dan praktik untuk menghasilkan data yang lebih lengkap terkait dengan topik penelitian fenomena munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.

1.7.4.3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui proses terjun langsung ke lapangan dengan menyelidiki atau mengawasi perilaku dan aktivitas individu yang terjadi di lokasi penelitian. Data yang didapat dari observasi adalah berupa gambaran sikap, perilaku, dan tindakan antar individu. Observasi terhadap segala sesuatu yang bisa diamati terkait ruang lingkup topik penelitian yang diambil yaitu penelitian dengan topik fenomena munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.

1.7.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara tertulis atau dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode penelitian ini merupakan metode pengumpulan dengan menelusuri data-data historis dari dokumentasi suatu peristiwa, seseorang dan kejadian yang bermanfaat untuk melengkapi data dari suatu penelitian. Penelitian ini dalam melakukan penelusuran terkait tema penyelenggaraan pilkada calon tunggal tersebut perlu mengabadikan beberapa aktivitas yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

1.7.5 Sumber dan Jenis Data

Dalam penggunaan sumber data dalam penelitian kali ini, terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1.7.4.1 Data primer

Merupakan data yang secara langsung dalam pemberian informasinya pada pelaksanaan proses pengumpulan data tersebut. Data primer diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil dari proses wawancara dari informan dan narasumber

terkait. (Sugiyono, 2008). Penelitian ini juga berasal dari hasil observasi dari fenomena dan problematika secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari pihak yang terkait yaitu yang termasuk dalam instansi KPU di kedua daerah tersebut yang menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal, serta dari perwakilan partai politik baik yang mendukung maupun tidak dan perwakilan masyarakat yang diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu.

1.7.4.2 Data Sekunder

Proposal penelitian ini selain dari menggunakan data primer juga dalam proses pengumpulan sumber data dari penelitian ini menggunakan jenis data data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini didapatkan dari studi literatur yang terkait dengan topik problematika permasalahan yang diambil oleh peneliti. Sumber dari data sekunder ini berasal dari buku, jurnal serta beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian penyelenggaraan pilkada calon tunggal tersebut. Selain itu juga sumber dari data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari media cetak dan juga situs-situs resmi dari instansi terkait dari penelitian ini, seperti di situs resmi KPU yang menyajikan data guna bertujuan membantu dalam sumber data penelitian yang diambil oleh peneliti.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan referensi dari studi literatur oleh Miles & Huberman dalam Hardani dkk (2020), terdapat 3 sistematika dalam aktivitas analisis data, yaitu diantaranya, merduksi, menyajikan, dan penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan

dalam pengumpulan data dapat terlaksana secara linier dan juga dapat terbentuk kekuatan pembangunan yang teranalisa secara general.

1.7.6.1 Reduksi Data

Memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian. Tujuannya agar data yang sama segera terkelompok pada bagian yang relevan dan mudah ditekukur bilamana diperlukan.

1.7.6.2 Penyajian Data

Penampilan data sistematis yang sudah diolah. Data-data yang *display* berupa *table*, *matriks*, *charst* atau grafik dan lain sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat mempelajari data dengan mudah.

1.7.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan keputusan data atas pertanyaan penelitian. Data-data yang telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola model, hubungan, sebab akibat dan persamaan dengan pendapat lain yang muncul kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Seandainya kesimpulan tersebut yang dihasilkan tersebut yang dihasilkan akan diadakan verifikasi dengan mencari data-data baru yang relevan.

1.7.7 Kualitas Data

Penelitian skripsi ini dari kualitas data dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. Kualitas data dalam penelitian skripsi menggunakan strategi validitas, dengan menggunakan tahapan triangulasi dari sumber data yang berbeda-beda yang disesuaikan dan dikombinasikan dengan kerangka pemikiran teoretis dan metode

penelitian penyelenggaraan pilkada.